

ANALISIS KEMISKINAN PETANI BERDASARKAN TIPOLOGI WILAYAH TEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

ANALYSIS OF FARMERS' POVERTY BASED ON TYPOLOGY OF RESIDENCE IN NORTH LOMBOK REGENCY

I Gusti Lanang Parta Tanaya^{1*}, Abdullah Usman¹, Asri Hidayati¹,
Anna Apriana Hidayanti¹

¹Program Studi Agribisnis Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Email penulis korespondensi: nonongtanaya@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dengan penduduk miskin 27,04 persen pada tahun 2021 jauh diatas persentase penduduk miskin di Provinsi NTB yaitu 14,14 persen. Penduduk miskin ini tersebar di seluruh desa yang ada di KLU namun yang rentan berubah kategori dari tidak miskin menjadi miskin adalah penduduk yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (Tramena). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan tipologi sistem pertanian di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara; menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, kondisi ekonomi rumah tangga, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta aspek kewilayahan terhadap kerentanan kemiskinan di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara dan menganalisis perbedaan magnitudo tingkat kerentanan rumah tangga miskin berdasarkan sistem pertaniannya di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan mengambil sampel sebanyak 90 orang yang terdiri atas 30 orang di masing-masing gili yang ada. Kerentanan kemiskinan dianalisis dengan fungsi z dan peluang terjadinya kerentanan ini dianalisis dengan Regresi Model Logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dari perspektif mikro dipengaruhi oleh kepala rumah tangga perempuan, jumlah tanggungan rumah tangga yang besar, rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat kesehatan kepala rumah tangga, kurangnya akses ke lembaga keuangan formal, kurangnya akses ke energi listrik, rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pembangunan, dan rendahnya nilai asset yang dimiliki. Kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara berasosiasi dengan karakteristik wilayah, dimana rumah tangga yang berdomisili pada wilayah tegalan dan kebun memiliki kerentanan atau peluang untuk menjadi miskin lebih kecil dibanding dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Peningkatan *share* sektor pertanian dan *share* sektor industri terhadap PDRB berpengaruh signifikan dalam mereduksi kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi besar pengaruhnya berbeda. Kemudian Peningkatan harga barang dan jasa (GDP_Deflator), peningkatan PAD dan gangguan moneter, berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pulau Kecil, Kerentanan

Abstract

North Lombok Regency (KLU) is an area where the majority of the population makes their living as farmers with a poor population of 27.04 percent in 2021, far above the percentage of poor people in NTB Province, namely 14.14 percent. These poor residents are spread across all villages in KLU, but those who are vulnerable to changing categories from not poor to poor are residents who live on small islands such as Gili Trawangan, Gili Meno and Gili Air (Tramena). The aim of this research is to identify the characteristics of poor households based on the typology of agricultural systems on small islands in North Lombok Regency; analyze the influence of education level, health, accessibility, household economic conditions, and level of community participation in the development process, as well as regional aspects on poverty vulnerability on small islands in North Lombok Regency and analyze differences in the magnitude of the level of vulnerability of poor households based on their agricultural system in Small islands in North Lombok Regency. The method that is used in this research is a descriptive analytical method by taking a sample of 90 people consisting of 30 people in each existing island. Vulnerability to poverty is analyzed using the z function and the probability of this vulnerability occurring is analyzed using Logit Model Regression. The research results show that household vulnerability to poverty from a micro perspective is influenced by the

female head of the household, the large number of household dependents, the low level of education of the head of the household, the health level of the head of the household, lack of access to formal financial institutions, lack of access to energy electricity, low level of participation in the development process, and low value of assets owned. Poverty in North Lombok Regency is associated with regional characteristics, where households who live in mountainous areas have a smaller vulnerability or opportunity to become poor compared to households who live in coastal and lowland areas. Increasing the share of the agricultural sector and the share of the industrial sector in GRDP has a significant effect in reducing poverty in North Lombok Regency, but the magnitude of the influence is different. Then the increase in prices of goods and services (GDP Deflator), increase in PAD and the monetary distortion, have an impact on decreasing people's purchasing power which ultimately affects the increase in the number of poor people.

Keywords: Poverty, Small Island, Vulnerability

PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dunia saat ini sehingga PBB menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tanggal 25 September 2015 di New York dengan tujuan nomor satu adalah menghapuskan seluruh bentuk dan dimensi kemiskinan sebelum tahun 2030 (Bappenas, 2017). Pemerintah Indonesia menerjemahkan SDGs ini dengan menerbitkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang juga menekankan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi nol persen dan kemiskinan biasa 7 persen pada tahun 2024 (TNP2K, 2020). Secara umum Saragih et al., (2021) menyatakan bahwa kondisi kemiskinan dapat mempengaruhi isu-isu pembangunan lain seperti kualitas kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan memiliki banyak definisi diantaranya dipandang sebagai kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah, di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku dan karena sumber-sumber ekonomi tidak dapat diakses dan dikuasai (Firdaus, 2014; Rini & Sugiharti, 2016), kemudian Adawiyah (2020) juga menambahkan bahwa kemiskinan relatif dirumuskan memiliki dimensi tempat dan waktu, dimana kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, dan kemiskinan pada waktu tertentu berbeda dengan waktu yang lain.

Kemiskinan ini menjadi persoalan yang kompleks pada suatu negara karena kemiskinan menyangkut banyak hal seperti masalah rendahnya pendapatan dan konsumsi, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakmampuan masyarakat yang miskin berpartisipasi dalam proses pembangunan (Fithri & Kaluge, 2017).

Definisi resmi menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Memahami bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan (Ferezagia, 2018).

Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan program pengentasan kemiskinan sejak jaman orde lama. Pada jaman pemerintahan Sukarno dengan program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Penasbede) 1961-1969 yang tidak dapat berjalan karena gejolak politik di pemerintahan kala itu dengan puncaknya G30S PKI. Pengentasan kemiskinan terjadi cukup signifikan pada era orde baru dengan penerapan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dari Pelita I sampai Pelita VI, sehingga dari tahun 1976 sampai 1996, jumlah penduduk miskin turun sebesar 31,7 juta, tetapi pada 1997 dan 1998, angka kemiskinan kembali naik signifikan dan tinggi pada era

reformasi karena adanya krisis moneter tahun 1998. Program pengentasan kemiskinan terus dijalankan sampai sekarang namun belum menunjukkan hasil yang baik.

Hal ini tidak lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang tepatnya penanggulangan kemiskinan dan kurangnya pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan itu sendiri sehingga kemiskinan masih tetap ada serta masih banyak faktor lainnya (Solikatun et al., 2014) Karena sifatnya multidimensi ini maka kondisi penduduk sangat mudah keluar masuk kategori dari tidak miskin berubah menjadi miskin. Peluang terjadinya perubahan status atau kategori ini disebut dengan kerentanan.

Kerentanan terhadap kemiskinan ini ditentukan oleh beberapa faktor utama. Pujiharto et al., (2018) dan Anto et al., (2022) menyatakan bahwa unsur modal sosial seperti jejaring sosial, saling percaya, norma dan nilai sosial dan partisipasi pada organisasi sosial memainkan peran penting dalam mengurangi kerentanan kemiskinan. Sementara Satria (2009) dan Harniati (2007) menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan dan kerentanan kemiskinan ditentukan oleh kondisi fisik dan agroekosistem wilayah tempat tinggal dan tempat berusaha. Sejalan dengan ini Usman et al., (2006) menemukan bahwa di Indonesia pada sisi karakteristik wilayah, daerah pegunungan dengan penciri usahatani tegalan dan kebun ternyata memiliki risiko kemiskinan atau kerentanan lebih tinggi dibandingkan daerah pantai dan dataran rendah. Lebih jauh Farida et al., (2022) dan Okuputra & Nasikh (2022) juga melaporkan bahwa kondisi wilayah (desa), kondisi sumberdaya manusia dan inovasi daerah berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah masyarakat menjadi miskin.

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagian besar penduduknya bermatapencarian sebagai petani dengan penduduk miskin 27,04 persen pada tahun 2021 jauh diatas persentase penduduk miskin NTB yaitu 14,14 persen (BPS KLU, 2022). Penduduk miskin ini tersebar di seluruh desa yang ada di KLU namun yang rentan berubah kategori dari tidak miskin menjadi miskin adalah penduduk yang tinggal di daerah-daerah yang rawan berubah kondisi fisik dan social ekonomi wilayah tempat tinggalnya seperti penduduk di pulau-pulau kecil Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air (Tramena). Penduduk di tiga gili ini menggantungkan hidupnya dari berkebun, beternak dan nelayan. Sementara kegiatan pariwisata hanya berkembang di Gili Trawangan yang saat ini juga melemah karena bencana Gempa 2018 dan Pandemi Covid-19 tahun 2020. Selain itu sektor pariwisata di Tramena ini lebih banyak dikuasai oleh orang-orang dari luar daerah ini. Sementara keluarga petani dan nelayan di Tramena ini tetap bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas. Oleh sebab itu maka dirasa perlu melakukan penelitian terkait kerentanan kemiskinan petani di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan tipologi system pertanian di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara, menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, kondisi ekonomi rumah tangga, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta aspek kewilayahan terhadap kerentanan kemiskinan di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara dan menganalisis perbedaan magnitude tingkat kerentanan rumah tangga miskin berdasarkan sistem pertaniannya di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan suatu wilayah secara sistematis dan akurat melalui data yang dipublikasi oleh instansi resmi terkait dan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode penelitian

dilakukan dengan teknik *desk study*, wawancara dan *indepth interview*. *Desk study* dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder yang ada pada instansi pemerintah daerah KLU. Teknik survey digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian ini. Data lainnya diperoleh dari dokumentasi yang tersedia dan hasil wawancara dengan pejabat/petugas/individu yang menangani permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang tersedia di Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Lombok Utara dan juga Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTB. Kegiatan penelitian terdiri dari kegiatan-kegiatan: pengumpulan data sekunder lembaga-lembaga terkait, pengumpulan data primer pada rumah tangga tani, kompilasi dan analisis data.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau-pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara yaitu Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air). Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan bahwa tingkat kemiskinan di Tramena relatif masih timpang dan menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Di samping itu wilayah Tramena memiliki tiga tipologi wilayah (wilayah pesisir, persawahan, dan kebun/ladang). Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan Oktober 2023. Secara rinci komponen metode penelitian ini dapat dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan Penelitian, Jenis Data, Sumber Data dan Metode Analisis yang Akan Diterapkan

Tujuan	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
1. Mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan tipologi sistem pertanian	Profil Umum RT, Kondisi Pendidikan, Kondisi Kesehatan, Kewilayahan, Akses RT ke Pelayanan Publik, Kondisi Ekonomi Rumah Tangga, Kelembagaan dan Partisipasi RT	Data Primer (Survei dan Wawancara)	Analisis Deskriptif dengan Tabel dan Grafik serta Analisis Varian (Anova)
2. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, kondisi ekonomi rumah tangga, dan tingkat partisipasi dalam proses pembangunan terhadap kerentanan kemiskinan.	Profil umum, Tingkat Pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan, aksesibilitas, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan aspek kewilayahan	Data Primer (survei, dan wawancara)	Model Persamaan Regresi Logit/ Minitab atau SPSS atau SAS
3. Menganalisis perbedaan magnitude tingkat kerentanan rumah	Sistem pertanian yang dikelola rumah tangga (UT di pesisir, sawah	Datar Primer (survei, wawancara dan FGD)	Model Persamaan Regresi Logit /

tangga miskin berdasarkan sistem pertaniannya	dataran rendah, dan Kebun atau ladang), Jumlah RTM	Minitab atau SPSS atau SAS
---	--	----------------------------

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah penarikan sampel area secara purposive yaitu Gili Tramena di Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hanya tiga gili ini merupakan pulau-pulau kecil yang berpenghuni di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki tiga sistem pertanian, yaitu usahatani pesisir, usahatani sawah dataran rendah, dan usahatani kebun atau ladang.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif atau kualitatif dilakukan untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan sistem pertanian yang dilakukan. Karakteristik rumah tangga miskin merupakan penciri umum untuk mengidentifikasi secara fisik rumah tangga dan dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Analisis ragam dilakukan untuk menentukan keragaman karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan sistem pertanian yaitu pada usahatani pesisir, usahatani sawah di dataran rendah, dan usahatani kebun/ladang dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha + \epsilon_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

dimana :

Y_{ij} = Pengamatan ke-j dari sampel ke-i

μ = Nilai tengah pengamatan ke-i

α = Sistem pertanian

ϵ_{ij} = Simpangan pengamatan ke-j dari nilai tengah sampel ke-i

Untuk menguji apakah pengamatan menyebar normal pada semua wilayah dilakukan uji statistik-F dengan hipotesis statistiknya, adalah:

$$H_0 = \mu_1 = \mu_2 = \dots \dots \dots = \mu_k, = 0$$

H_1 = Sekurang-kurangnya satu nilai tengah tidak sama.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, selanjutnya dilakukan uji beda terkecil (*least significant different/LSD*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerentanan Kemiskinan Berdasarkan Wilayah

Kerentanan terhadap kemiskinan dilakukan untuk melihat perbedaan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan berdasarkan karakteristik wilayah. Namun demikian, besar kecilnya pengaruh kerentanan berdasarkan wilayah bukan berarti wilayah yang rendah kerentanannya tidak memiliki peluang untuk menjadi miskin. Hasil analisis kerentanan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa, kerentanan atau peluang rumah tangga untuk menjadi miskin yang berdomisili di wilayah dataran rendah (0) sama saja dengan penduduk yang berdomisili pada wilayah pesisir (2), akan tetapi kerentanan atau peluang penduduk yang berdomisili di wilayah tegalan dan kebun dengan usaha utama tegalan dan kebun (1) adalah 0,28 kali dibandingkan dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dan dataran rendah, *ceteris paribus*. Dengan perkataan lain, rumah tangga yang berdomisili di wilayah tegalan dan kebun mempunyai kerentanan atau peluang untuk menjadi miskin yang lebih kecil dibanding dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dan dataran rendah.

Kerentanan rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah yang lebih besar dari rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun bukan hanya disebabkan adanya guncangan dalam tataran mikro, akan tetapi juga dipengaruhi oleh guncangan dalam tataran meso dan makro. Dalam tataran mikro kerentanan rumahtangga sesuai dengan hasil analisis dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses ke lembaga keuangan formal, terbatasnya akses dalam proses pembangunan, dan minimnya nilai asset yang dimiliki. Demikian halnya dengan rumah tangga pada wilayah dataran rendah dipengaruhi oleh jenis kelamin kepala rumah tangga (perempuan), jenis pekerjaan kepala rumah tangga (petani), jumlah tanggungan keluarga, akses lembaga keuangan formal, dan juga nilai asset produktif yang dimiliki sangat rendah.

Dalam tataran rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh nelayan rentan terhadap perubahan iklim/cuaca. Ketika terjadi musim barat (cuaca buruk) aktivitas melaut untuk mencari ikan bagi nelayan dengan alat tangkap yang sederhana semakin terbatas, bahkan ada yang tidak melakukan aktivitas selama berminggu-minggu. Ketidakadaan aktivitas tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari alternatifnya hanya melakukan pinjaman pada pemodal.

Masyarakat miskin nelayan di Kabupaten Lombok Utara juga mengalami masalah kerusakan sumberdaya alam berupa kerusakan hutan bakau dan terumbu karang. Kerusakan hutan bakau diakibatkan oleh terjadinya pembukaan lahan tambak yang secara massif dan kerusakan terumbu karang terjadi karena penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan zat kimia. Hal ini berdampak pada rusaknya habitat tempat induk ikan mencari makan dan bertelur. Data dari Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa terjadi kerusakan hutan bakau selama 20 tahun terakhir, yaitu dari sekitar 160 Ha pada tahun 1990, menurun menjadi 57 Ha pada tahun 2008. Degradasi lingkungan pesisir mengakibatkan menurunnya populasi ikan dari sampai 10% di kawasan perikanan tangkap dan meningkatnya kesulitan nelayan dalam memperoleh ikan (SNPK, 2005).

Selain itu, di Kabupaten Lombok Utara terjadi peningkatan penggunaan alat tangkap besar yang menggunakan pukot yang sebagian besar dimiliki oleh penduduk luar yang berdampak pada kalahnya nelayan lokal yang hanya mengandalkan alat tangkap sederhana. Akibatnya, bukan hanya pada menurunnya hasil tangkapan akan tetapi juga terjadinya kebocoran sumberdaya wilayah sebagai akibat meningkatnya transaksi di tengah laut. Terjadinya transaksi di tengah laut berdampak pula pada rendahnya nilai tambah dan kinerja ekonomi Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan. Dengan demikian maka kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan pada wilayah pesisir dan dataran rendah sangat rentan. Terjadinya banjir yang sering kali melanda wilayah pesisir dan dataran rendah berdampak pada gagal panen baik untuk pertanian tanaman pangan seperti padi, juga pada petani tambak.

Di samping itu, dari hasil pengamatan dapat diindikasikan bahwa rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah lebih terbuka perekonomiannya dibanding dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah tegalan dan kebun. Rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dalam melakukan aktivitasnya membutuhkan investasi yang besar, seperti nelayan dengan menggunakan motor tempel dan petani tambak. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan harga seperti perubahan harga bahan bakar bagi nelayan dan sarana produksi bagi petani tambak secara otomatis berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Karena perekonomiannya lebih terbuka, maka rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah rentan terhadap adanya guncangan dalam tataran makro seperti krisis ekonomi.

Sedangkan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah tegalan dan kebun kerentanannya lebih kecil dibanding kedua wilayah lainnya. Dari hasil analisis kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan di wilayah tegalan dan kebun dari tataran mikro dipengaruhi oleh besarnya jumlah tanggungan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, terbatasnya akses ke energi listrik (PLN), dan juga rendahnya nilai aset produktif yang dimiliki. Namun demikian, rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun dengan mata pencaharian yang dominan sebagai petani dan buruh tani (78,33%) memiliki sumber pendapatan alternatif karena masih tersedianya sumberdaya alam di wilayah tersebut. Keragaman mata pencaharian penduduk yang berdomisili di wilayah tegalan dan kebun lebih variatif dan dapat dilakukan tanpa menggunakan investasi besar dibanding dengan rumahtangga yang berdomisili di wilayah pesisir dan dataran rendah. Selain mata pencaharian sebagai petani, rumah tangga di wilayah tegalan dan kebun juga memiliki mata pencaharian alternatif lain seperti peternak (besar dan kecil), perajin gula kelapa, perajin arang pengganti kayu bakar, dan pencari umbi-umbian di kebun-kebun. Beragamnya sumber pendapatan alternatif mempengaruhi tingkat kerentanan rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun dibanding dengan di wilayah pesisir dan dataran rendah. Ketika terjadi guncangan dalam tataran meso seperti gagal panen dan dalam tataran makro seperti guncangan ekonomi, rumah tangga di wilayah tegalan dan kebun dapat memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumberdaya alam yang tersedia.

Hasil kajian penelitian ini, juga menunjukkan bahwa rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun yang memiliki ternak sapi dan petani gula kelapa memiliki kontribusi besar dalam pendapatan rumah tangga. Dengan kondisi demikian, ketika terjadi guncangan eksternal baik dari tataran meso maupun makro rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun lebih stabil dibanding rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Namun demikian, secara keseluruhan tingkat kesejahteraan penduduk yang berdomisili pada wilayah tegalan dan kebun baik dari aspek mikro dan makro masih jauh tertinggal di banding penduduk pada wilayah dataran rendah dan pesisir. Hal ini lebih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi di wilayah tegalan dan kebun.

Salah satu kekuatan lain yang dimiliki rumah tangga di wilayah tegalan dan kebun dalam menghadapi permasalahan kemiskinan adalah modal sosial. Modal sosial rumah tangga dapat diukur melalui beberapa indikator seperti budaya gotong royong, tingkat partisipasi dalam aktivitas yang bermanfaat terhadap masyarakat, kemauan untuk memberikan bantuan fisik dan finansial, dan tingkat kepercayaan sosial. Modal sosial yang dimiliki rumah tangga merupakan jaring pengaman dan kekuatan internal bagi rumah tangga miskin dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, apabila modal finansial dan modal fisik sudah tidak ada.

Dari hasil survei dan wawancara ditemukan bahwa secara keseluruhan indikator modal sosial tersebut lebih tinggi pada wilayah tegalan dan kebun dibandingkan dengan wilayah pesisir dan dataran rendah. Partisipasi rumah tangga dalam aktivitas gotong royong misalnya tertinggi pada wilayah tegalan dan kebun yaitu 53,32 persen, kemudian disusul pada wilayah pesisir (38,33 persen), dan terkecil pada wilayah dataran rendah yaitu hanya sekitar 21,67 persen. Demikian halnya dengan kemauan rumah tangga untuk memberikan bantuan berupa uang ketika dilakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat, juga berbeda antara wilayah. Rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun yang bersedia untuk memberikan bantuan berupa uang sebesar 72 persen, kemudian disusul oleh wilayah pesisir sebesar 62 persen, dan terkecil pada wilayah dataran rendah, yaitu hanya 35 persen. Dari data tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa rumah tangga yang berdomisili di wilayah tegalan dan kebun memiliki modal sosial yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah pesisir dan dataran rendah. Tingginya modal sosial membuat rumah tangga pada wilayah tegalan dan kebun lebih stabil dalam menghadapi eksternalitas dibanding dengan rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah.

Implikasi temuan penelitian ini dalam upaya pengentasan kemiskinan, dimana modal sosial dijadikan sebagai jaring pengaman, perlu dibina dan ditumbuhkembangkan serta dilakukan revitalisasi budaya gotong royong padasemua wilayah terutama pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Selain itu, perlu mendorong kepedulian sosial terutama dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan kepentingan bersama, melalui kelembagaan sosial yang dapat bermanfaat bukan hanya dalam mengakselerasi pengentasan kemiskinan, akan tetapi dapat bermanfaat dalam segala bidang pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan dari penelitian ini menegaskan temuan Usman et al., (2006) yang menggunakan data nasional bahwa penduduk yang berdomisili pada wilayah pegunungan dengan penciri usaha utamanya adalah tegalan dan kebun lebih rentan terhadap kemiskinan dibanding dengan penduduk yang berdomisili pada wilayah dataran rendah dan pesisir. Sedangkan Harniati (2007) menemukan bahwa rumah tangga miskin di lahan basah lebih rentan dibanding rumah tangga di agroekosistem lainnya. Rumah tangga miskin di lahan basah lebih rentan terhadap perubahan misalnya perubahan harga barang dan jasa yang termasuk dalam bundel garis kemiskinan. Selanjutnya, dikatakan bahwa rumah tangga di tegalan dan kebun relatif paling rendah kerentanannya dibandingkan dengan agroekosistem lainnya.

Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa fenomena kemiskinan rumah tangga berbeda karakteristiknya antar wilayah. Sehingga metode pengentasan kemiskinan berdasarkan wilayah seyogyanya dilakukan secara hati-hati dan memberikan ruang yang besar dan mendorong pemerintah daerah dalam membuat program dan kegiatan pengentasan kemiskinan spesifik lokal atau tidak bisa dilakukan secara umum pada semua wilayah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memiliki inovasi dan kreatifitas dalam membuat desain program pengentasan kemiskinan dan tidak hanya bergantung pada program dan kegiatan pengentasan kemiskinan nasional (SNPK, 2005).

Perbandingan Variabel Kerentanan

Dari hasil uji regresi logit yang dilakukan secara menyeluruh dimana variabel wilayah dijadikan sebagai variabel dummy, maka untuk mempertegas perbedaan variabel yang memengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dilakukan analisis secara parsial pada masing-masing wilayah. Analisis parsial yang dilakukan pada wilayah pesisir dilakukan dengan menggunakan sampel sebesar 90 rumah tangga. Sedangkan untuk wilayah tegalan dan kebun, pesisir dan dataran rendah menggunakan sampel masing-masing 30 rumah tangga. Dari hasil analisis kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan pada tiga wilayah ditemukan beberapa variabel yang signifikan secara statistik. Variabel yang memengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan memiliki persamaan dan perbedaan antar wilayah (Tabel 2).

Variabel yang memengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan pada semua wilayah adalah variabel nilai asset produktif rumah tangga. Artinya, rumah tangga yang memiliki nilai asset produktif tinggi (dalam hal ini adalah lahan, perahu, ternak, dan sarana produksi lain yang dimiliki) memiliki kerentanan atau peluang untuk menjadi miskin yang lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga yang hanya memiliki nilai asset produktif yang rendah.

Tabel 2. Perbandingan variabel yang memengaruhi kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan berdasarkan wilayah di Kabupaten Lombok Utara

Variabel	Koefisien	P-Value	Odds Rasio	Keterangan
<u>1. Pesisir :</u>				
RT_SAK	-0,1864	0,051	0,83	Tahun
D ₅ _AkLKeu	-2,6773	0,000	0,24	1 = Ya, 0 jika lainnya
D ₉ _PrPEMB1	0,1441	0,850	1,15	D ₁ = 1, jika tidak aktif dlm proses pemb. dan 0, jika lainnya.
D ₉ _PrPEMB2	-1,5895	0,015	0,20	D ₂ = 1, jika aktif dlm proses pemb., dan 0, jika lainnya.
Nilai Asset	-0,0307	0,000	0,97	(Rp. Juta)
<u>2. D. Rendah</u>				
D ₁ _JNKL	-3,9557	0,004	0,02	1= Laki-laki, 0 perempuan
D ₂ _PKKRT	1,6809	0,089	5,37	1 = Petani, 0 lainnya
JMTG	0,4717	0,095	1,60	Jml Tanggungan (jiwa)
D ₅ _AkLKeu	-2,8166	0,031	0,06	1 = Ya, 0 lainnya
Nilai Asset	-0,0988	0,014	0,91	(Rp. Juta)
<u>3. Tegalan dan Kebun</u>				
JMTG	0,2973	0,080	1,35	Jml Tanggungan (jiwa)
D ₃ _PDKRT1	-1,0795	0,171	0,34	D ₁ = 1, jika tamat SD, 0 lainnya
D ₃ _PDKRT2	-3,7484	0,002	0,02	D ₂ = 1, jika tamat SMP, 0 lainnya
D ₈ _Ak PLN	-2,0727	0,005	0,13	1 = Akses ke PLN, 0 lainnya
Nilai Asset	-0,0849	0,000	0,92	(Rp. Juta)

Sedangkan variabel akses ke lembaga keuangan formal (D₅_AkLKeu) hanya berpengaruh terhadap kerentanan rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah, tetapi tidak pada wilayah tegalan dan kebun. Dari data primer yang diperoleh bahwa akses rumah tangga terhadap lembaga keuangan formal pada wilayah tegalan dan kebun adalah homogen atau merata. Artinya, rumah tangga yang miskin dan tidak miskin pada wilayah tegalan dan kebun memiliki akses yang terbatas terhadap lembaga keuangan formal, sehingga tidak berpengaruh nyata secara statistik. Sebaliknya, rumah tangga miskin di wilayah pesisir dan dataran rendah memiliki akses yang terbatas terhadap lembaga keuangan formal, sementara rumah tangga tidak miskin memiliki akses ke lembaga keuangan formal yang relatif lebih baik.

Selanjutnya, variabel jumlah tanggungan rumah tangga (JMTG) berpengaruh terhadap kerentanan rumah tangga pada wilayah dataran rendah dan tegalan dan kebun, akan tetapi tidak berpengaruh pada wilayah pesisir. Pada wilayah tegalan dan kebun dan dataran rendah jumlah tanggungan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin menyebar relatif tidak seragam. Artinya, rumah tangga miskin memiliki jumlah tanggungan yang besar, sedangkan rumah tangga tidak miskin memiliki jumlah anggota rumah tangga yang kecil. Sedangkan pada wilayah pesisir rata-rata jumlah tanggungan baik bagi rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin relatif seragam.

Di sisi lain, tingkat pendidikan dan rata-rata sekolah anggota rumah tangga (D₃_PDKRT) memengaruhi kerentanan rumah tangga pada wilayah pesisir dan tegalan dan kebun, akan tetapi tidak berpengaruh pada wilayah dataran rendah. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan rata-rata lama sekolah anggota keluarga pada

wilayah dataran rendah relatif lebih seragam dibanding dengan rumah tangga pada wilayah pesisir dan tegalan dan kebun. Seragamnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga pada wilayah dataran rendah penyebab tidak signifikannya variabel ini terhadap kerentanan atau peluang rumah tangga untuk menjadi miskin. Sebaliknya pada wilayah pesisir dan tegalan dan kebun, karena tingkat pendidikan antara rumah tangga yang miskin dan tidak miskin tidak seragam berpengaruh nyata dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan rumah tangga.

Tiga variabel lain yang berbeda pengaruhnya terhadap kerentanan rumah tangga, yaitu tingkat partisipasi dalam proses pembangunan (D_9_PrPEMB) pada wilayah pesisir, jenis pekerjaan kepala rumah tangga pada wilayah dataran rendah, dan akses ke PLN pada wilayah tegalan dan kebun. Keterlibatan penduduk dalam proses pembangunan pada wilayah pesisir relatif tidak seragam atau tingkat keterlibatan rumah tangga tidak miskin dalam proses pembangunan lebih dominan dibanding rumah tangga miskin dalam proses pembangunan. Sedangkan pada wilayah dataran rendah dan tegalan dan kebun keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan relatif seragam. Artinya, penduduk miskin dan tidak miskin pada wilayah dataran rendah dan tegalan dan kebun sama-sama aktif dalam proses pembangunan sehingga tidak berpengaruh nyata dan signifikan secara statistik terhadap kerentanan rumah tangga dalam kemiskinan.

Implikasi dari temuan penelitian ini, bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan menggunakan satu pola umum yang berlaku sama pada semua wilayah, tetapi perlu mengembangkan berbagai model spesifik yang sesuai dengan kerentanan dan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan wilayah.

Determinan Kemiskinan

Determinan kemiskinan atau faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB dianalisis dengan menggunakan model persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Model persamaan yang dirumuskan terdiri dari 9 (sembilan) variabel bebas, dan hasil analisis menunjukkan bahwa 8 (delapan) variabel bebas berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata mulai dari $\alpha = 1$ persen sampai dengan 10 persen.

Hasil analisis persamaan dalam penelitian ini menghasilkan nilai R-squared (R^2) yang cukup besar yakni 0.9871. Hal ini menunjukkan bahwa variasi nilai dari variabel dependen (*dependent variabel*) dapat dijelaskan oleh peubah penjelas (*independent variabel*) sebesar 98.71 persen. Dengan kata lain, peubah penjelas dapat menjelaskan perilaku model secara baik dengan nilai *Durbin-watson* 2,65.

Selanjutnya asumsi terjadinya multikolinearitas tampaknya tidak menjadi hal yang serius. Hal ini dapat ditunjukkan oleh matrik korelasi (*correlation matrix*), bahwa semua nilai matriks berada di bawah 0,8 yang mengindikasikan tidak ada multikolinearitas. Di samping itu, salah satu cara untuk mendeteksi masalah multikolinearitas adalah apabila koefisien determinasi (R^2) tinggi tapi signifikansi nilai t-statistik rendah (sedikit variabel yang signifikan). Berdasarkan hasil analisis, persamaan yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R^2) cukup tinggi (98,71 persen), dimana persamaan tersebut juga memiliki signifikansi nilai t-statistik yang tinggi (hanya satu variabel yang tidak signifikan).

Berdasarkan pada gambaran umum hasil dugaan dari persamaan yang dibangun, serta berbagai hasil pengujian terhadap asumsi-asumsi penting dalam analisis regresi linear, maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini cukup baik untuk menjelaskan keragaan determinan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara selama periode tahun 2022. Secara ringkas hasil estimasi model persamaan regresi determinan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model Persamaan Regresi Determinan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
Intercept	96,069	17,0003	5,6511	0,0024
G_PUBLIK(-3)	-0,00012	0,00004	-3,2893	0,0217
G_POV(-3)	-0,00051	0,00084	-0,5997	0,5749
PDRBKAP(-2)	-0,00462	0,00134	-3,4446	0,0183
PAD(-3)	0,00228	0,00052	4,2051	0,0084
GDP_DEF(-4)	0,09598	0,01430	6,7111	0,0011
SSAGR(-1)	-1,45064	0,30046	-4,8281	0,0048
SSIND(-2)	-3,20603	1,51627	-2,1144	0,0881
Dummy D.Fiskal(-4)	-9,79067	2,88093	-3,3984	0,0193
Dummy Krisis Moneter(-1)	5,23922	1,59403	3,2867	0,0218
<u>R-Square =98,17</u>				

Hasil estimasi persamaan determinan kemiskinan sebagaimana dalam persamaan dan Tabel 3 di atas, diperoleh nilai intercept sebesar 96.069 yang mengindikasikan bahwa akan terjadi peningkatan jumlah rumah tangga miskin sebesar 96.069 persen, ketika semua variabel dependent lainnya (X) tidak berubah, *ceteris paribus*. Selanjutnya pengaruh variabel dependent lainnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara, secara ringkas dan berturut-turut dapat dijelaskan berikut ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara spesifik dan selektif baik yang terkait dengan aspek mikro, aspek makro dan aspek wilayah. Secara umum diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dari perspektif mikro dipengaruhi oleh kepala rumah tangga perempuan, jumlah tanggungan rumah tangga yang besar, rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat kesehatan kepala rumah tangga, kurangnya akses ke lembaga keuangan formal, kurangnya akses ke energi listrik, rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pembangunan, dan rendahnya nilai asset yang dimiliki.
2. Kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara berasosiasi dengan karakteristik wilayah, dimana rumah tangga yang berdomisili pada wilayah tegalan dan kebun memiliki kerentanan atau peluang untuk menjadi miskin lebih kecil dibanding dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dan dataran rendah.
3. Peningkatan *share* sektor pertanian dan *share* sektor industri terhadap PDRB berpengaruh signifikan dalam mereduksi kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi besar pengaruhnya berbeda.
4. Peningkatan harga barang dan jasa (GDP_Deflator), peningkatan PAD dan krisis moneter, berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.

Saran

1. Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memberi peluang bagi penduduk miskin untuk lebih terlibat dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan distribusi pendapatan.
2. Kebijakan peningkatan keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Pembangunan sektor pertanian yang terintegrasi dengan sektor industri dapat menjadi katalis percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini mampu meningkatkan akumulasi kapital dan menekan kebocoran wilayah serta mendorong perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata.
3. Penelitian tentang kemiskinan berdasarkan wilayah dikaitkan dengan aliran barang, jasa, dan orang (migrasi) diperlukan sebagai dasar untuk mengidentifikasi pola interaksi fenomena kemiskinan secara spasial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S.E. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, 1 (1), 43-50.
- Anto, R. P., Rahmatyah, S., Gunawan, G., & Togala, R. (2022). Identifikasi Potensi Modal Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3503-3512.
- BPS NTB. (2022). Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2022. Mataram.
- Bradshaw, T. K. (2007). Theories of poverty and anti-poverty programs in community development. *Community Development*, 38(1), 7-25.
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 191-205.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1-6.
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial. *Jurnal ekonomi dan Pembangunan*, 22(1), 55-67..
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129-136.
- Harniati. (2007). Tipologi Kemiskinan dan Kerentanan Berbasis Agroekosistem dan Implikasinya pada Kebijakan Pengurangan Kemiskinan (Disertasi tidak dipublikasikan) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(1), 159-166.
- Pujiharto, S., Maryunani., & Manzilati, A. (2018). Identifikasi Modal Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(1).
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia: analisis rumah tangga. *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, 1(2), 88-104.
- Saragih, I. D., Tonapa, S. I., Saragih, I. S., Advani, S., Batubara, S. O., Suarilah, I., & Lin, C. J. (2021). Global prevalence of mental health problems among healthcare workers during the Covid-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. *International journal of nursing studies*, 121, 104002.

- Satria, D. (2009). Strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal dalam rangka program pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1).
- SNPK. (2005). Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Solikatun, S., Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70-90.
- Usman, U., Sinaga, B. M., & Siregar, H. (2006). Analisis determinan kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(3), 44007.